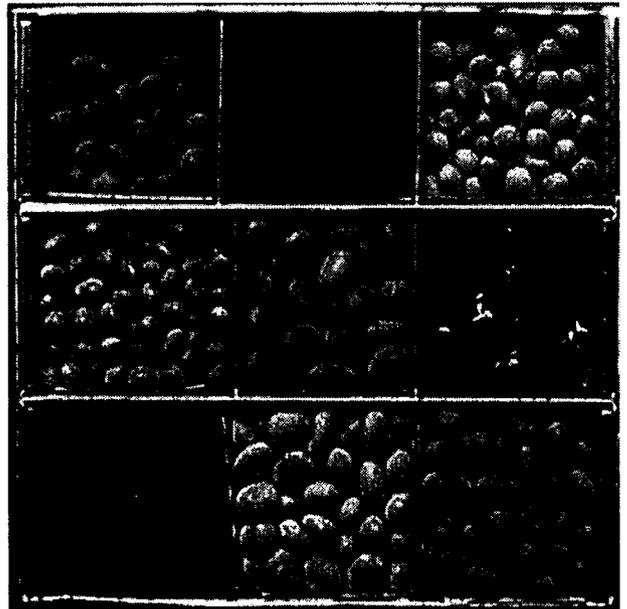


KEUNGGULAN DAYA SAING DAN TEKNIK IDENTIFIKASI KOMODITAS UNGGULAN

DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI EKONOMI REGIONAL



Oleh:
Arief Daryanto, PhD¹

Pendahuluan

Pembangunan wilayah (*regional development*) pada dasarnya adalah pelaksanaan pembangunan nasional pada suatu wilayah yang telah disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial serta ekonomi dari wilayah tersebut, serta tetap menghormati peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Menurut Setyawan (2004) bias kebijakan pembangunan yang hanya bertumpu pada kemampuan sektoral, apabila ditinjau dari ekonomi wilayah akan menimbulkan dua masalah. Pertama, kemungkinan terjadinya disintegrasi struktur perekonomian dalam pengertian struktur perekonomian cenderung lebih berkembang dan terpusat hanya pada satu wilayah. Bila hal itu berlangsung untuk waktu yang lama atau dalam jangka panjang dapat menimbulkan hubungan yang bersifat eksploitatif antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kedua, dikhawatirkan akan terjadi misalokasi sumberdaya nasional yang disebabkan kurang

¹ Direktur Kerjasama dan Pengembangan Magister Manajemen Agribisnis IPB dan Kepala Bagian Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian IPB.

dimanfaatkannya keunggulan komparatif wilayah (*regional competitive advantage*), sehingga untuk jangka panjang akan melemahkan potensi suatu wilayah untuk berkembang.

Selama ini pembangunan yang dilaksanakan terlalu bersifat megeneralisasi keadaan dan permasalahan yang ada. Artinya terjadi keseragaman arahan pembangunan sebagai konsekuensi dari kuatnya sifat

sentralistik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diimplementasikan di daerah. Ketimpangan yang begitu besar terjadi antara daerah Jawa dan Luar Jawa sehingga kesan *Javanistic* lebih dominan dalam pembangunan Indonesia. Munculnya terminologi Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia sebagai rasa ketidakpuasan dari hasil pembangunan yang terlalu condong dan berpihak ke kawasan barat. Kesenjangan



juga terjadi antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Perbedaan kecepatan pertumbuhan telah menyebabkan terjadinya kesenjangan kemajuan pembangunan antar wilayah dalam berbagai hal. Disparitas pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam (a) pendapatan per kapita, (b) kualitas sumberdaya manusia, (c) ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, (d) pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan dsb., serta (e) akses ke perbankan. Menurut Daryanto (2004), kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini terutama disebabkan oleh (a) distorsi perdagangan antar daerah,

(b) distorsi pengelolaan sumberdaya alam, dan (c) distorsi sistem perkotaan-perdesaan.

Dalam kajian regional, aspek *local spesific* sangat diperhatikan. Paradigma pembangunan wilayah saat ini perlu memperhatikan *local spesific* wilayah yang dapat meningkatkan potensi wilayah tersebut dan yang tidak hanya sekedar memanfaatkan keunggulan komparatif tetapi juga mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi.

Konsep pembangunan pada suatu wilayah harus tetap mengacu pada kondisi wilayah itu sendiri (*inward looking*). Pemilihan prioritas pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat pada hakikatnya kesejahteraan masyarakatlah yang diutamakan. Konsep pembangunan dengan berbagai dimensi yang diterapkan pada suatu wilayah sering menemukan kenyataan bahwa konsep tersebut memerlukan modifikasi atau penyesuaian ke arah karakteristik lokal (*local*

spesific).

Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan tinggi dengan mengandalkan keunggulan komparatif semata berupa kekayaan alam yang berlimpah, upah tenaga kerja murah, dan posisi strategis, saat ini sulit untuk dipertahankan lagi. Daya saing tidak dapat diperoleh dari misalnya faktor upah rendah atau tingkat bunga rendah, tetapi harus pula diperoleh dari kemampuan untuk melakukan perbaikan dan inovasi secara berkesinambungan. Porter (1990) menyatakan bahwa faktor keunggulan komparatif telah dikalahkan oleh

kemajuan teknologi. Namun demikian, setiap wilayah masih mempunyai faktor keunggulan khusus yang bukan didasarkan pada biaya produksi yang murah saja, tetapi lebih dari itu, yaitu adanya inovasi (*innovation*).

Bagi Indonesia, sumberdaya alam yang dimiliki tidak cukup untuk menjaga *sustainability* pembangunan, sehingga paradigma baru pembangunan yang diterjemahkan sebagai pembangunan wilayah, yang mengarah pada pembentukan keunggulan daya saing perlu digali dan tentunya setelah itu perlu dan harus diterapkan.

Daya Saing Wilayah (Regional)

Definisi

Per definisi, konsep daya saing diekspresikan oleh beberapa orang dan lembaga dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak terlepas dari pandangan atau konteks yang mereka telaah. Menurut Porter (1990) bahwa konsep daya saing yang dapat diterapkan pada level nasional tak lain adalah produktifitas yang didefinisikan sebagai nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Bank Dunia menyatakan hal yang hampir sama, yaitu daya saing mengacu kepada besaran serta laju perubahan nilai tambah per unit input yang dicapai oleh perusahaan. Kedua definisi di atas mengakui bahwa daya saing tidak secara sempit mencakup hanya sebatas tingkat efisiensi suatu perusahaan (mikro perusahaan) tetapi juga mencakup aspek di luar perusahaan seperti iklim berusaha (*business environment*) yang merupakan faktor di luar kendali perusahaan (*external*) seperti aspek yang bersifat *firm-specific*, *region-specific*, atau bahkan *country-specific*.

World Economic Forum (WEF), suatu lembaga yang secara rutin menerbitkan "*Global Competitiveness Report*", mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional yang mencapai pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Komponennya meliputi kebijakan-kebijakan yang tepat, institusi yang sesuai, karakteristik ekonomi lain yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut.

Di lain pihak, *Institute of Management Development* (IMD), suatu lembaga yang menerbitkan "*World Competitiveness Yearbook*" secara rutin, mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, *globality* dan *proximity* serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu model ekonomi dan sosial. Dengan kata lain daya saing nasional adalah suatu konsep yang diharapkan dapat mengidentifikasi peranan negara dalam memberikan iklim yang kondusif kepada perusahaan-perusahaan dalam rangka mempertahankan daya saing domestik dan global.

Pada tingkat wilayah di dalam suatu negara (*regions*), konsep daya saing daerah didefinisikan Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI), lembaga yang secara rutin menerbitkan "*Regional Competitiveness Indicators in United Kingdom*", sebagai kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik dan internasional. Di lain pihak definisi yang dikemukakan oleh *Centre for Urban and Regional Studies* (CURDS) di Inggris adalah kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. CURDS merupakan suatu lembaga yang menerbitkan "*The Competitiveness Project: 1998 Regional Benchmarking Report*".

Dari dua konsep definisi daya saing yang telah diuraikan di depan baik daya saing nasional dan daya saing daerah

pada prinsipnya memiliki substansi (esensi) yang sama. Perbedaan yang ada hanya pada cakupan wilayahnya saja. Dalam diskusi daya saing nasional diakui bahwa pengadopsian konsep daya saing nasional ke dalam konsep daya saing daerah atau wilayah adalah relevan.

Substansi pengadopsian konsep daya saing nasional ke dalam konsep daya saing daerah memang relevan, tetapi dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian. Misalnya saja, persaingan atau kompetisi ekonomi antar negara tentunya tidak akan sama persis dengan kompetisi antar daerah dalam suatu negara.

Berdasarkan uraian konsep dan definisi di atas dapat dikatakan bahwa sulit menemukan keseragaman definisi yang utuh. Walau dengan definisi yang tidak begitu seragam tersebut, para ahli umumnya mempunyai kesamaan pendapat tentang apa saja yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing. Oleh karenanya, definisi yang pasti dan disepakati semua pihak tidak lagi menjadi syarat mutlak dalam rangka mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan daya saing suatu negara.

Dengan demikian, pendefinisian daya saing memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Cakupan daya saing lebih luas dan tidak sebatas produktifitas atau efisiensi saja.
2. Pelaku ekonomi (*economic agent*) berada dalam suatu sistem ekonomi yang bersinergi.
3. Sasaran peningkatan daya saing suatu perekonomian adalah bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk.
4. Hakikat daya saing adalah kompetisi. Oleh karena itu daya saing tidak akan pernah ada pada suatu perekonomian yang tertutup.

Faktor yang Mempengaruhi Keunggulan Daya Saing Wilayah

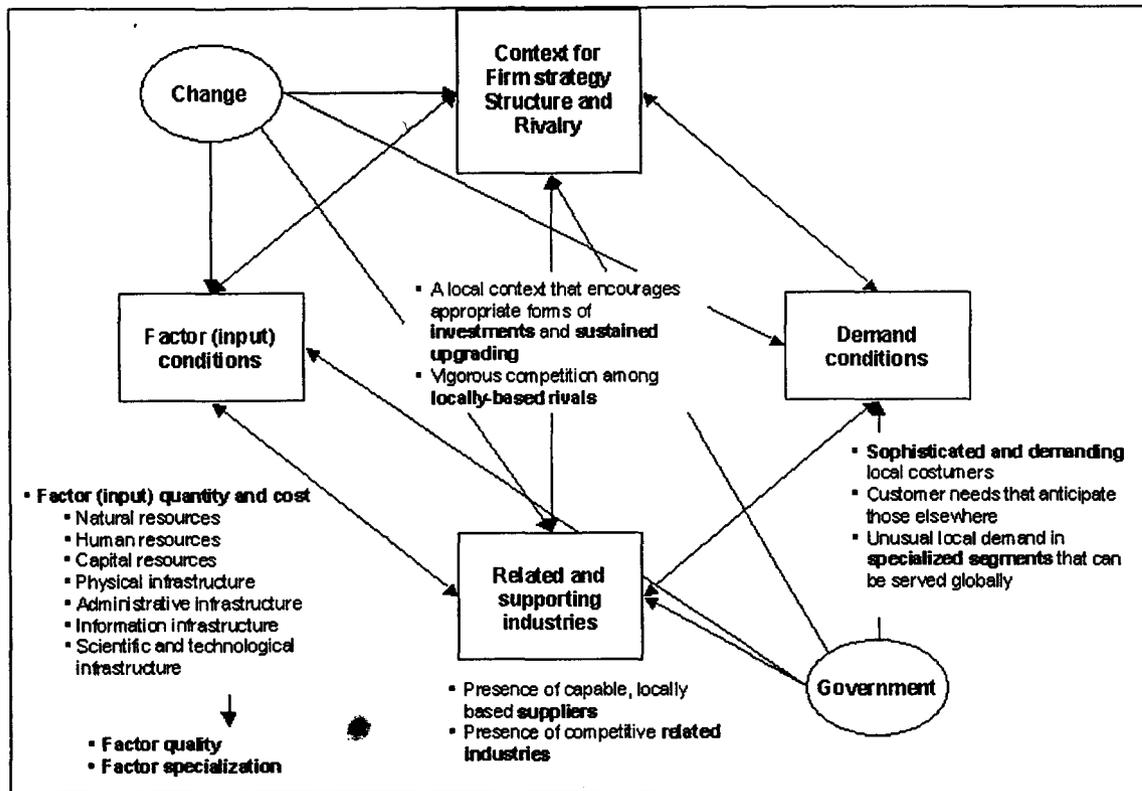
Faktor penentu keunggulan daya saing wilayah pada tulisan ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Porter (1990). Keunggulan daya saing suatu wilayah ditentukan oleh empat faktor pokok dan dua faktor penunjang.

Empat faktor produksi yang dimaksud adalah kondisi faktor produksi (*factor condition*), kondisi permintaan pasar (*demand condition*), industri-industri terkait dan industri pendukung (*related and supporting industries*) serta strategi perusahaan, struktur dan persaingan (*firm strategy, structure and rivalry*). Sedangkan faktor penunjangnya adalah peluang (*chance*) dan peranan pemerintah (*role of government*). Secara ringkas komponen tersebut akan diilustrasikan di bawah ini dan secara skematis dapat hubungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

1. Kondisi Faktor Produksi

Faktor produksi yang diperlukan dalam menciptakan keunggulan daya saing antara lain sebagai berikut:

- a. Sumberdaya manusia, indikatornya kuantitas, kualitas, gaji, standar jam kerja dan etika kerja.
- b. Sumberdaya alam yang berupa ketersediaan lahan, indikatornya kuantitas, kualitas, aksesibilitas, harga tanah, air, mineral, serta iklim dan lokasi.
- c. Sumberdaya pengetahuan, indikatornya jumlah ilmuwan dan teknokrat.
- d. Sumberdaya modal, indikatornya jumlah dan besarnya investasi yang disediakan untuk mendukung produk-produk unggulan suatu wilayah.
- e. Infrastruktur wilayah, indikatornya jenis, kualitas dan biaya penggunaannya, termasuk sistem jaringan transportasi, telekomunikasi dan energi.



Gambar 1. Faktor-faktor Penentu Keunggulan Daya Saing Wilayah (Diadopsi dari Porter, 1990)

Hirarki faktor produksi perlu dibuat untuk mengetahui peranan factor produksi di dalam menciptakan keunggulan daya saing wilayah. Hirarki tersebut dapat dikelompokkan ke dalam *basic factors* dan *advanced factors*. Penciptaan faktor produksi atau *factor creation* merupakan hasil yang diciptakan melalui investasi, dengan mekanisme penciptaannya baik melalui lembaga pendidikan maupun program pendidikan dan pelatihan. Untuk menciptakan keunggulan daya saing wilayah, maka jauh lebih baik dan lebih utama melalui mekanisme penciptaan faktor-faktor produksi dibandingkan dengan faktor-faktor yang diwariskan (*basic factor*).

Suatu wilayah yang sukses dalam industrinya adalah wilayah yang mampu menciptakan dan mengembangkan *factor creation* yang dibutuhkan. Wilayah itu akan memiliki keunggulan daya saing dapat menciptakan faktor-faktor produksi yang terspesialisasi (*specialized factors*). Tidak ada satu wilayah yang dapat menciptakan dan

mengembangkan semua tipe dan jenis faktor produksi. Penentuan tipe dari faktor produksi yang akan diciptakan dan dikembangkan dan seberapa besar efektivitasnya sangat tergantung pada kondisi permintaan lokal, keberadaan industri pendukung dan industri terkait, tujuan perusahaan dan karakteristik persaingan domestik.

2. Kondisi Permintaan Pasar

Karakteristik kondisi permintaan pasar adalah hal yang penting dalam menciptakan keunggulan daya saing wilayah, sebagai berikut:

- Komposisi permintaan pasar domestik. Pada umumnya perusahaan di suatu wilayah permintaan terhadap produk yang dihasilkan biasanya tersegmentasi. Makin besar segmentasi pasar suatu wilayah maka akan lebih mudah wilayah tersebut memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan-perusahaannya mampu memenuhi permintaan pembeli

domestik. Perusahaan-perusahaan di suatu wilayah akan meraih keunggulan jika dapat mengantisipasi permintaan pasar di wilayahnya sendiri.

- b. Ukuran dan pola pertumbuhan permintaan pasar domestik yang meliputi ukuran permintaan pasar domestik, jumlah pembeli bebas, laju pertumbuhan permintaan pasar domestik, permintaan awal pasar domestik dan titik jenuh awal.
- c. Internasionalisasi permintaan pasar domestik. Komposisi permintaan pasar domestik merupakan akar keunggulan suatu wilayah, sementara ukuran dan pola pertumbuhan permintaannya dapat memperkuat keunggulan dengan caendorong pemasaran produk ke luar negeri.

3. Industri-industri pendukung dan industri terkait

Industri-industri pemasok yang mempunyai keunggulan daya saing akan memberikan potensi keunggulan bagi industri di suatu wilayah. Hal itu disebabkan industri pemasok menghasilkan input yang digunakan secara meluas dan penting bagi inovasi dan internasionalisasi. Kehadiran industri yang bersaing secara global dalam suatu wilayah pada bidang atau sektor yang berkaitan dengan industri lain dapat memberikan keunggulan daya saing bagi industri tersebut. Adanya industri yang saling terkait dan bersaing secara internasional di suatu wilayah akan dapat menciptakan keunggulan daya saing.

4. Strategi perusahaan, struktur dan persaingan

Faktor penentu ini meliputi strategi dan sruktur perusahaan domestik, tujuan perusahaan dan individu serta persaingan domestik.

5. Peluang

Suatu sistem akan terbentuk dari resultante faktor penentu keunggulan daya saing wilayah. Sistem tersebut dapat terganggu oleh sesuatu sebab baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Misalnya, tindakan penemuan (*invention*), perubahan besar dalam bioteknologi dan mikroelektronik, terjadinya perubahan besar dalam biaya input dan terjadinya perang serta bencana alam.

6. Peranan Pemerintah

Pada dasarnya peranan pemerintah hanya sebatas mempengaruhi kondisi faktor produksi, kondisi permintaan pasar (melalui kebijakan moneter dan keuangan), dan mengatur perdagangan. Berarti, pemerintah tidak dapat menciptakan keunggulan daya saing. Pengaruh yang dapat diberikan pemerintah terhadap keempat faktor pokok penentu keunggulan daya saing adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi faktor produksi dipengaruhi melalui kebijakan-kebijakan publik seperti subsidi dan kebijakan pendidikan.
- b. Kondisi permintaan pasar dipengaruhi melalui penentuan standar produk lokal.
- c. Industri-industri terkait dan pendukung di dalam suatu wilayah dipengaruhi dengan melakukan pengontrolan terhadap media periklanan maupun melakukan regulasi yang diperlukan.
- d. Strategi perusahaan, struktur dan persaingan dipengaruhi melalui berbagai perangkat lunak seperti regulasi pasar modal, kebijakan pajak dan *antitrust*.

Tahap Perkembangan Keunggulan Daya Saing Wilayah

Perkembangan keunggulan daya saing dapat dikelompokkan ke dalam empat tahap, yaitu *factor-driven*, *investment-driven*, *innovation-driven* dan *wealth-driven*.

Tiga tahapan yang pertama menggambarkan peningkatan keunggulan daya saing suatu wilayah, sedangkan tahap yang terakhir merupakan tahap di mana wilayah sudah mengalami penurunan keunggulan daya saingnya.

Pada tahap *factor-driven*, keunggulan daya saing suatu wilayah sebagian besar bersumber dari *basic factor*, seperti sumberdaya alam berlimpah dan tenaga kerja murah. Di lain pihak, pada tahapan *investment-driven*, keunggulan daya saing muncul karena dipacu oleh investasi yang besar dari perusahaan lokal dan transnasional dalam rangka membangun industri berteknologi tinggi, berskala besar, modern dan efisien. Pada tahap ini belum sampai pada tahap *state-of-the-art*.

Pada tahap *innovation-driven*, sumber keunggulan daya saing suatu wilayah berasal dari tingkat produktifitas tenaga kerja yang terampil dan pemanfaatan teknologi tinggi yang telah mencapai tahap *state-of-the-art*. Pada tahap ini suatu wilayah tidak hanya mampu melakukan *improvement* terhadap teknologi yang sudah ada, tetapi juga sanggup menciptakan teknologi baru. Tahap terkahir *wealth-driven* merupakan tahap di mana keunggulan daya saing mulai menurun karena tingkat kemakmuran masyarakatnya sudah tercapai.

Dalam upaya meningkatkan keunggulan daya saing maka suatu wilayah harus melakukan hal-hal berikut:

1. Mengupayakan meningkatnya penciptaan faktor-faktor produksi
2. Meningkatkan motivasi bekerja, keuntungan serta skala usaha
3. Meningkatkan persaingan domestik
4. Meningkatkan kualitas permintaan
5. Meningkatkan kemampuan menciptakan peluang-peluang usaha baru.

Identifikasi Komoditas Unggulan

Pengertian dan Konsep

Konsep pengembangan wilayah secara garis besar terbagi atas empat, sebagai berikut (Komet, 2000).

1. Pengembangan wilayah berbasis sumberdaya
Sumberdaya merupakan semua potensi yang dimiliki oleh alam dan manusia. Bentuk sumberdaya tersebut yaitu tanah, bahan mentah, modal, tenaga kerja, keahlian, keindahan alam maupun aspek sosial budaya.
2. Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan
Penekanan konsep ini pada motor penggerak pembangunan wilayah pada komoditas yang dinilai dapat menjadi unggulan atau andalan, baik di tingkat domestik dan internasional.
3. Pengembangan wilayah berbasis efisiensi
Penekanan pada konsep ini adalah pengembangan wilayah melalui pembangunan bidang ekonomi yang mempunyai porsi lebih besar dibandingkan bidang-bidang lainnya. Pembangunan ekonomi tersebut dijalankan dalam kerangka pasar bebas atau pasar persaingan sempurna (*free market mechanism*).
4. Pengembangan wilayah menurut pelaku pembangunan
Strategi pengembangan wilayah ini mengutamakan peranan setiap pelaku pembangunan ekonomi (rumah tangga, lembaga sosial, lembaga keuangan dan bukan keuangan, pemerintah maupun koperasi).

Konsep Kompetensi Inti (*Core Competence*)

Kompetensi inti dalam konteks pengembangan wilayah merupakan upaya dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sektor-sektor yang berkembang di wilayah tertentu. Semakin baik pengkoordinasian dan pengintegrasian tersebut maka akan semakin tinggi upaya penciptaan kompetensi inti, yang berimplikasi pada sulitnya wilayah lain untuk bersaing dengannya.

Keunggulan bersaing atau daya saing suatu wilayah tercipta jika kawasan tersebut memiliki kompetensi inti (*core competence*) yang dapat dibedakan dari wilayah lainnya. Kompetensi inti dapat diraih melalui *creation of factor*, yaitu upaya menciptakan berbagai faktor produksi yang jauh lebih baik dibandingkan para pesaingnya.

Kawasan atau wilayah yang telah mencapai tahapan kompetensi inti memiliki empat atribut, (Board, 1993) seperti dibawah ini.

1. Kemampuan untuk memberikan akses pada variasi pasar yang lebih luas
2. Kemampuan memberikan kontribusi yang signifikan kepada persepsi pelanggan atas manfaat yang diperoleh dari barang dan jasa yang ditawarkan.
3. Kemampuan menghasilkan barang dan jasa unggulan yang sangat sulit ditiru akan menciptakan hambatan masuk (*entry barriers*) bagi kawasan lain untuk memberikan layanan serupa.
4. Kemampuan melakukan koordinasi yang kompleks dari beragam teknologi dan keahlian terapan.

Kata kunci pada kompetensi inti adalah *market intelligence*. Suatu wilayah akan dapat bersaing secara global, jika pengambil keputusan dan dunia usaha dapat mengkaji bagaimana suatu kompetensi inti dan peluang ekonomi suatu wilayah dapat disesuaikan dengan permintaan pasar lokal dan ekspor. Untuk mengadakannya diperlukan dukungan *market intelligence* yang mampu memandang ke depan mengenai pasar serta mampu mengantisipasi adanya kecenderungan konsumsi dan ekspor. *Market intelligence* juga harus mampu menganalisis perubahan pasar dan pengembangan kompetensi inti itu sendiri agar permintaan terhadap barang dan jasa dapat dipenuhi di masa datang.

Dengan pemberian otonomi yang besar pada daerah, maka di masa datang keberhasilan pengembangan wilayah sangat tergantung pada kebijaksanaan pemerintah daerah

terutama dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah harus mampu mengembangkan visi pengembangan wilayahnya masing-masing sesuai dengan nilai, arah dan tujuan yang akan mengarahkan masa depan wilayah yang bersangkutan. Porter (1990) menyatakan bahwa penguatan spesialisasi unit-unit kecil wilayah otonom dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yakni inovasi dan pembaharuan. Strategi pengembangan yang didasarkan pada tenaga kerja yang murah serta besaran skala ekonomi tertentu (*economic of scale*) merupakan paradigma yang sudah usang (kuno).

Penguatan kapasitas pada tingkat lokal dapat dicapai dengan memaksimalkan keunggulan lokal dan masyarakat yang tinggal di wilayah lokal tersebut merupakan para pelaku kunci dalam mengkaitkan komponen-komponen kunci pembentuk daya saing wilayah. Dalam rangka penguatan kapasitas lokal, berbagai agen-agen pembangunan baik di Eropa dan USA pada saat ini sibuk memfasilitasi pengembangan kluster industri (*industry cluster*), di mana setiap kluster menspesialisasikan pengembangan keunggulan yang melekat pada komunitas lokalnya.

Profesor Michael Porter dari Harvard University merupakan pemikir terdepan yang mengembangkan konsep kluster industri. Porter mempunyai argumen bahwa keberhasilan ekonomi lokal dan regional sangat tergantung kepada investasi yang inovatif, perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan internasional dan juga dukungan kualitas infrastruktur sosial dan ekonomi. Istilah '*industry cluster*' kerap digunakan secara bergantian dengan '*industry precinct*'. Istilah yang terakhir berasal dari Eropa, sedangkan istilah yang pertama dikembangkan oleh Porter dari pengalaman Amerika Serikat. Konsep kluster industri menyangkut dimensi spasial yang lebih luas dan bukan hanya pengembangan properti semata,

Definisi kluster industri yang paling sederhana dikemukakan oleh Dorienger dan Terkla (1995) sebagai berikut “*geographical concentrations of industries that gain performance advantages through co-location*”. Definisi ini serupa dengan ekonomi aglomerasi, namun pada kenyataannya dalam kluster industri yang diamati adalah aglomerasi ekonomi di dalam kluster industri. Profesor Michael Porter mempopulerkan konsep kluster industri dalam bukunya *The Competitive Advantage of Nations* (1990). Porter mengembangkan “*Diamond of Advantage*” seperti yang dikemukakan terdahulu untuk menentukan apakah perusahaan dan industri dalam suatu wilayah mempunyai keunggulan kompetitif. Salah satu faktor kunci penentu keberhasilan kluster industri adalah keberhasilan suatu wilayah dalam mengidentifikasi keberadaan kluster industri yang akan dikembangkan.

Teknik Identifikasi Potensi Wilayah dan Komoditas Unggulan

Berbeda dengan pendekatan konvensional perencanaan fisik wilayah yang selama ini yang menekankan kepadatan penduduk, jumlah penduduk dan struktur kota-kota, pendekatan baru yang akhir-akhir ini populer digunakan mengutamakan konsentrasi wilayah produksi dan komoditas unggulan. Penekanan tulisan ini adalah bagaimana mengembangkan suatu wilayah dengan basis komoditas unggulan. Beberapa kriteria mengenai komoditas unggulan antara lain (Alkadri *et al.*, 2001):

1. Harus mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian. Dengan kata lain, komoditas unggulan tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. Misalnya, cengkeh di Sulawesi Utara, Kakao di Sulawesi Tenggara dan minyak bumi dan gas di Nangroe Aceh Darussalam dan pariwisata di Bali.
2. Mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward linkages*) yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya.
3. Mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain (*competitiveness*) di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi dan kualitas pelayanan.
4. Memiliki keterkaitan dengan wilayah lain (*regional linkages*), baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku.
5. Memiliki status teknologi (*state-of-the-art*) yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
6. Mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
7. Dapat bertahan dalam jangka panjang tertentu, mulai dari fase kelahiran (*increasing*), pertumbuhan (*growth*) hingga fase kejenuhan (*maturity*) atau penurunan (*decreasing*). Jika komoditas unggulan yang satu memasuki tahap kejenuhan atau penurunan maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.
8. Tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.
9. Pengembangannya harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalnya keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelambagaan, fasilitas insentif/disinsentif dan lain-lain.
10. Pengembangannya berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Terdapat beberapa cara atau teknik kuantifikasi untuk mengidentifikasi atau mengetahui suatu sektor atau komoditas dikatakan sebagai sektor atau komoditas unggulan. Pada tulisan ini akan dikemukakan dua cara saja. Cara pertama dengan menghitung besarnya indeks *forward* dan *backward linkage*, sebagaimana dikatakan pada point kedua di atas. Teknik ini dikenal pada analisis Tabel Input-Output. Keterkaitan ke depan menyatakan akibat

dari suatu sektor atau komoditas tertentu terhadap sektor-sektor yang menyediakan output bagi sektor tersebut baik secara langsung dan tidak langsung per unit kenaikan permintaan total, sedangkan keterkaitan ke belakang menyatakan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menyediakan input antara bagi sektor tersebut per unit kenaikan permintaan total.

Suatu komoditas atau sektor akan menjadi komoditas unggulan bila nilai *forward linkage* dan *backward linkage* lebih besar dari satu, dan *backward spread effect* dan *forward spread effect* lebih kecil dari satu. Kriteria tersebut dikenal dengan nama *Rasmussen's dual criterion* (Daryanto and Morison, 1992). Dapat dikatakan bahwa teknik ini untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan sektor atau komoditas unggulan yang akan dikembangkan terhadap pembangunan sektor atau komoditas lainnya baik ke depan maupun ke belakang.

Cara identifikasi kedua seperti yang akan dijelaskan di bawah ini merupakan prosedur yang lebih mudah dan sederhana serta sifatnya *practical*. Penentuan komoditas unggulan didasarkan pada kriteria tertentu, kemudian kriteria tersebut diberi skor (*scoring*) agar dapat disusun prioritas pengembangannya. Mengingat ketersediaan data pada skala wilayah yang dirinci menurut sektor, cara *scoring* tersebut terbukti sangat bermanfaat. Walaupun mudah dan praktis tetapi prosedur seperti ini tentunya memiliki tingkat subyektifitas yang tinggi dibandingkan teknik *backward and forward linkage*. Disamping itu, teknik *scoring* hanya menyajikan informasi yang terbatas mengenai daya saing dan kinerja wilayah.

Kasus teknik *scoring* seperti di atas diterapkan pada Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan kepulauan Kabupaten Sangihe Talaud, Propinsi Sulawesi Utara pada tahun 2000. Oleh karenanya ilustrasi untuk menentukan komoditas unggulan yang relatif lebih mudah tersebut akan menggunakan kasus tersebut.

Kriteria yang digunakan dan bobot penilaiannya (*score*) dalam penentuan komoditas unggulan di Sangihe Talaud adalah (Kepel *et al.*, 2000):

1. Ketersediaan sumberdaya alam
Score: (1) kecil, (2) sedang, (3) besar
2. Ketersediaan sumberdaya buatan
Score: (1) kecil, (2) sedang, (3) baik
3. Ketersediaan sumberdaya manusia
Score: (1) kecil, (2) sedang, (3) besar
4. Kontribusi terhadap perekonomian kawasan,
Score: (1) kecil, (2) sedang, (3) besar
5. Kemungkinan dikembangkan dalam skala ekonomi/ industri,
Score: (1) kecil, (2) sedang, (3) besar
6. Penyerapan tenaga kerja,
Score: (1) kecil, (2) sedang, (3) besar
7. Dampak pengembangan spasial
Score: (1) kecil, (2) sedang, (3) besar
8. Potensi pasar lokal,
Score: (1) kecil, (2) sedang, (3) besar
9. Potensi pasar ekspor,
Score: (1) kecil, (2) sedang, (3) besar
10. Hambatan biaya, teknologi dan kelembagaan,
Score: (1) besar, (2) sedang, (3) kecil

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat dilakukan penilaian secara komparatif seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Dari tabel tersebut tampak bahwa komoditas kelapa menempati urutan pertama sebagai komoditas unggulan, karena mempunyai skor total yang tertinggi (28). Komoditas lain yang potensial menjadi komoditas unggulan adalah pala (26), ikan (26), cengkeh (24) dan wisata bahari (21). Implikasinya adalah kegiatan ekonomi dan investasi selayaknya diarahkan kepada sektor atas komoditas unggulan tersebut.

Tabel 1. Penilaian Komoditas/Sektor Unggulan Kabupaten Sangihe Talaud

No	Jenis Komoditas/Sektor	Kriteria										Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Kelapa	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	28
2	Pala	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	26
3	Cengkeh	3	2	2	3	2	2	3	3	1	3	24
4	Ikan	3	1	2	3	3	3	3	2	3	3	26
5	Hasil laut lainnya (mutiara dll)	3	1	1	2	2	3	2	1	3	2	20
6	Perkapalan (kapal ikan)	2	1	1	3	3	3	3	2	1	2	21
7	Wisata bahari	3	1	3	2	2	2	2	1	3	2	21
8	Coklat	3	2	2	3	1	2	3	3	2	2	23
9	Ketela rambat/pohon	1	2	2	1	1	1	1	1	1	3	14
10	Ayam buras	3	2	2	1	2	2	2	3	1	2	20
11	Babi	2	2	2	1	1	1	2	2	1	3	17
12	Pasir/bijih besi	2	1	1	2	2	2	2	2	3	2	19

Sumber : Kepel, *et al.*, 2000

Kriteria Produk Unggulan *Local-Spesific*

Pada uraian berikut menyajikan beberapa kriteria produk atau komoditas unggulan yang sifatnya *local-specific*, yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Riau, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Kriteria Produk Unggulan: Propinsi Riau

- Dukungan SDA terhadap pengembangan industri yang menghasilkan produk unggulan tersebut cukup tersedia di daerah yang bersangkutan.
- Mempunyai dampak besar terhadap pengembangan ekonomi dan industri daerah.
- SDM harus mendukung terhadap kebutuhan pengembangan industri yang bersangkutan, baik ke hulu maupun hilirnya.

Kriteria Produk Unggulan: Jawa Barat

- Mempunyai kontribusi yang tinggi atau sangat berperan terhadap industri yang menghasilkan produk unggulan lain.

- Mempunyai kontribusi yang besar untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna bagi pengembangan produk unggulan lain.
- Mempunyai kontribusi yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan mendiversifikasi produk bagi produk unggulan lain.
- Memberi kontribusi yang besar terhadap akumulasi penguasaan teknologi dan kemampuan perekayasaan sektor industri maupun sektor ekonomi lainnya.
- Memperkuat struktur industri.

Kriteria Produk Unggulan: DKI Jakarta

- Memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi.
- *Local content* lebih besar dari impor.
- Penyerapan tenaga kerja cukup besar.
- Mempunyai kontribusi yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan mendiferensiasi produk bagi produk unggulan lain.
- Mempunyai kontribusi yang besar terhadap akumulasi penguasaan teknologi dan kemampuan perekayasaan.
- Mempunyai peluang berkembang di kemudian hari.

Kesimpulan dan Saran

Selama ini studi-studi yang membahas tentang globalisasi, program penyesuaian struktural (*structural adjustment program*) dan daya saing perekonomian negara-negara di dunia telah sering dilakukan (Porter, 1990). Namun demikian, daya saing yang bersifat internasional untuk perekonomian wilayah sangat sedikit dilakukan. Padahal, wilayah-wilayah, bukan lagi negara, yang merupakan penghela pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, memahami daya saing saing wilayah menjadi sangat penting bagi setiap wilayah dalam penyusunan rencana strategisnya, terutama untuk memacu pembangunan ekonomi dan memperluas pasar pada perekonomian global.

Teknik identifikasi komoditas unggulan dan konsep kluster industri yang didiskusikan dalam makalah ini sangat bermanfaat bagi kajian tentang daya saing dan kinerja suatu wilayah. Salah satu masalah besar yang dihadapi dalam penyusunan strategi pengembangan wilayah adalah terbatasnya data perekonomian pada tingkat wilayah dan lokal. Dengan demikian teknik *scoring* dan konsep kulster industri yang disarankan dalam makalah ini dapat digunakan untuk mengevaluasi mengenai daya saing dan kinerja wilayah.

Hasil kajian yang diperoleh dari analisis kualitatif tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan strategis pengembangan wilayah. Implikasi penting hasil kajian seperti ini bagi kebijakan pengembangan wilayah adalah bagaimana mengembangkan sektor-sektor yang memiliki daya saing dan keterkaitan yang kuat, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempunyai peran kunci dalam mempengaruhi daya saing sektor-sektor dalam perekonomian suatu wilayah.

Daftar Pustaka

- Alkadri, *et al.* 2001. Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah. Edisi Revisi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta.
- Board, B.H. 1993. The Art of Strategic Planning for Information Technology: Crafting Strategy for the 90s. John Wiley & Sons, Inc. New York.
- Daryanto, A. and J.B. Morison. 1992. "Structural interdependence in the Indonesian economy, with emphasis on the agricultural sector, 1971-1985: an input-output analysis", *Mimbar Sosek* 6: 74-99.
- Daryanto, A. 2004. "Disparitas Pembangunan dan Pentingnya Keterkaitan Perkotaan-Perdesaan di Indonesia", *Sinergi Desa-Kota 1*: 10-15.
- Doeringer, P.B., and D.G. Terkla. 1995. "Business strategy and cross-industry clusters". *Economic Development Quarterly* 9: 225-37.
- Kepel, *et al.* 2000. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Kepulauan Kabupaten Sangihe Talaud. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta.
- Komet, M. 2000. Perencanaan Terpadu Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom, Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Porter, M.E. 1990. The Competitive Advantage of Nations. The Free Press. New York.
- Setiawan, B. 2004. "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan-Perdesaan di Indonesia: Beberapa Kritik dan Saran Ke Depan, *Sinergi Desa-Kota* 1: 23-30.